

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien sebesar 9,760006. Artinya, apabila PDRB mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 9,760006 persen.
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar -0,471629. Artinya, apabila indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,471629 persen.
3. Variabel jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien sebesar 4,370006. Artinya, apabila jumlah penduduk meningkat satu persen, maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 4,370006 persen.
4. Variabel Angka Melek Huruf (AMH) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien sebesar -0,321203.

Artinya, apabila angka melek huruf meningkat satu persen, maka tingkat kemiskinan menurun sebesar 0,321203 persen.

5. Berdasarkan hasil output Eviews, nilai F_{hitung} yang diperoleh yaitu sebesar 1831,561 dengan nilai probabilitas (*F-Statistic*) sebesar 0,000000 ($< 0,05$) maka dapat ditarik kesimpulan uji hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel independen yaitu Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_1), Indeks Pembangunan Manusia (X_2), Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk (X_3) dan Angka Melek Huruf (X_4) berpengaruh signifikan secara simultan (keseluruhan) terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan (Y).

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dan diuraikan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran implikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memaksimalkan potensi ekonomi lokal dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Diharapkan dengan adanya perhatian dan pengembangan sektor-sektor unggulan daerah tersebut dari pemerintah daerah masing-masing maka akan meningkatkan PDRB daerah dan menyediakan lapangan kerja serta pemerataan upah bagi masyarakat setempat sehingga dapat dilakukan pengentasan kemiskinan yang turut mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus memperhatikan dan menginvestasikan lebih banyak dalam hal pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. Pendidikan yang baik membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan kesempatan yang lebih baik lagi bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan mendapatkan pekerjaan yang layak, maka masyarakat memiliki daya beli yang menjadikan masyarakat turut mendapatkan kehidupan yang layak.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memperhatikan dengan berinvestasi dalam layanan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sebagai tenaga kerja. Kesehatan yang baik juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan ketiga hal ini, maka Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dapat memperhatikan secara keseluruhan pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memperhatikan pertumbuhan jumlah penduduk dengan melakukan berbagai program atau kebijakan seperti melakukan program Keluarga Berencana (KB) dengan memperluas akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan KB, terutama di daerah pedesaan dan menyediakan layanan KB secara gratis atau bersubsidi bagi keluarga miskin.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu membangun secara merata infrastruktur dan fasilitas umum di daerah pedesaan untuk mengurangi arus urbanisasi. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesempatan ekonomi di daerah-daerah dengan mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata lokal serta menerapkan kebijakan pembangunan berimbang antara wilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah.

4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus memperhatikan, membangun dan memperbaiki sekolah-sekolah di daerah terpencil dan miskin untuk memastikan bahwa semua anak-anak memiliki kesempatan akses ke pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah juga menyediakan pendidikan dasar dan menengah yang gratis untuk dapat mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga lebih banyak anak-anak bisa menyelesaikan pendidikan mereka.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu terus memperhatikan ketersediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memberikan bantuan finansial langsung kepada keluarga miskin untuk mendukung kebutuhan pendidikan dasar anak-anak.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu secara konsisten melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan melek huruf bagi pengentasan kemiskinan melalui media massa dan sosial serta mengajak organisasi

masyarakat dan LSM untuk turut serta dalam program-program literasi dan pendidikan.